



## Bangunan Pinggir Sungai Berstatus Quo

● SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA – Sebagian besar bangunan yang berada di kawasan bantaran sungai di Kota Yogyakarta saat ini berstatus quo. Kepemilikan tanah di kawasan tersebut merupakan sebagian besar milik keraton.

Kepala Seksi Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Muhamad Rusdiyansyah, mengungkapkan saat ini bangunan tersebut masih dibiarkan karena belum diperlukan untuk kepentingan pemerintah maupun umum. Namun, jika saatnya sudah diperlukan, mau tidak mau masyarakat harus mundur dari kawasan pinggir sungai.

"Itu sudah diatur dalam Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 untuk penetapan garis sungai dan danau itu status bangunannya status quo. Tapi kalau butuh ya harus dibongkar, walaupun itu rumah sudah dari zaman dahulu. Quo itu dibiarkan selama be-

lum diperlukan," kata Rusdi, saat ditemui di ruang kerjanya.

Walaupun begitu, BBWSSO tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggusuran. Namun, BBWSSO berwenang memberikan rekomendasi berapa jarak antara bantaran sungai dan permukiman penduduk yang boleh dibangun di sekitar kawasan pinggir sungai.

"Kewenangan kami pengelolaan sungai, waduk, danau, termasuk mata air. Siapa yang mau memanfaatkan tanah milik pemerintah harus ada rekomendasi dari BBWS yang memba-wahi wilayah tersebut," ujarnya, menegaskan.

Dalam hal ini pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi teknis. "Kami hanya menentukan garis sepadan sesuai yang ditetapkan pemerintah. Mau di (Sungai) Opak, mau di Progo, mau di Oyong mau di Gajah Wong, Code, dan sebagainya," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Per-tanahan dan Tata Ruang, Hari Setyo-

wacono, menyatakan penataan tidak akan dilakukan dengan melakukan penggusuran. Sebab, beberapa dari masyarakat yang tinggal di pinggir sungai masih enggan mundur dari kawasan tersebut.

"Kita pelan-pelan melakukan penataan itu. Inti penataan kita memang tidak melakukan istilahnya penggusuran, tapi kita lakukan penataan. Syukur masyarakat yang berada di bantaran sungai mau mundur," ujarnya.

Dilakukannya penataan, lanjutnya, tentu untuk kepentingan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Sebab, ia menilai, permukiman tersebut berpotensi terkena longsor maupun banjir saat musim penghujan.

"Kita memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat bahwa kita melakukan penataan juga untuk kepentingan masyarakat yang ada di situ," katanya.

■ ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005